

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Terjemahan. (2015). Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

Sumber Dari Buku

Ar-Raghib, Al-Ashfahani. 2013. *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, cet. III. Damaskus: Dar Al-Qalam,.

Ekonomi, Sosial, dan Politik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Indonesia: Badan Penerbit Salemba Empat.

Halim Abdul, et.al. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta, Indonesia. Penerbit Salemba Empat.

Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta, Indonesia. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Kuswandi. 2016. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Edisi 4. Bekasi, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan*.

Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.

Mardiasmo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mardiasmo. 2009. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Penerbit UPP STIM YKPN.

Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Terjemahan Singkat Tafsir Katsir Jilid 4. Surabaya: Rungkut Industry, 2015.

Ya'cub, Hamzah. 2013. *Etika Islam*. Bandung: Diponegoro.

Website:

Data Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat. (2019). Akses: 03 September 2019. On-line: <https://jabarprov.go.id/>

Dhafi. (2013). Makalah Jujur dalam Perkataan dan Perbuatan. Akses: 04 Juli 2014. On-line: <http://ukhuwahislah.blogspot.com/2013/10/makalah-jujur-dalam-perkataan-dan.html>.

Fauziyah, Iva. (2012). Al-Fauz dan Al-Falah dalam Al-Qur'an. Akses: 23 Juli 2019. On-line: <http://ivafauziyah.blogspot.com/2012/06/al-fauz-dan-al-falah-dalam-al-quran.html>.

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Kota Prov. Jabar tahun 2015-2017. Akses: 04 September 2019. On-line: <http://www.bpk.go.id/>

Syaddad, A . Farhan dan Salim, Agus. (2009). Di akses pada tanggal 23 Agustus 2019. dari <https://mpiuiika.wordpress.com/2009/10/22/makalah-diskusi-mpi-kelompok-1/>

Ubudiyah. (2019). Di akses pada tanggal 21 Agustus 2019 dari. <https://islam.nu.or.id/post/read/112916/keutamaan-lafal-bismillah>.

Sumber Dari Jurnal

- Agustina, O. Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang. *Jurnal; Ekonomi* Vol 1. No 10. Tahun 2013.
- Ayu, Puspita, Putri. Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE*. Vol.3 No.1, Tahun 2018.
- Bisma, I Dewa Gde & Hery Susanto. (2010). “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007”. *Jurnal. GaneÇ Swara Edisi Khusus* Vol. 4 No.3, Mataram.
- Demora, Viozana. Analisis derajat desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* Vol.5 No.1, Tahun 2016.
- Fathah, Rigel, Nurul. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*. Vol.8 No.1, Tahun 2017.
- Halim, Abdul, Aceng. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka- Jawa Barat. *Jurnal SEKURITAS* Vol.1 No. 4, Tahun 2018.
- Nelwan, Mosses dan Aisah, Siti, Iis. Analisis kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2011-2015 di kabupaten sumedang provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* Vol.43 No.2, Tahun 2017.
- Oppier, Hermi. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”. *Jurnal Benchmark* Vol. 2. November 2013.
- Pangke, R. H, Aldy, Saerang, S. Ivonne dkk. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA* Vol. 5 No. 2, Tahun 2017.
- Pauwah, Sudirman. Saerang, Ivonne dan Mandey, Silvyva. Analisis Kinerja Keuangan daerah pada pemda kabupaten kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.3, Tahun 2014.

- Pramono, Joko. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menuai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal among Markati* Vol. 7 No. 13. Tahun 2014.
- Rahmayani, Anim. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun anggaran 2011- 2013. *Jurnal EKA CIDA* Vol. 1 No.1, Tahun 2016.
- Saputra, Boni dan Fernando, Riki. Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol.5 No.3, Tahun 2017.
- Silviana dan melisa. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2008-2012. *Jurnal PROFITA* Vol.6 No.3, Tahun 2014.
- Soedarsa, Goenawan, Herry dan Putri, Dwi, Trysmarini, Avrina. Analisis Kinerja Keuangan pemerintah kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol.5 No.2, Tahun 2014.
- Sijabat, Yosephen, Mentari dan Saleh, Choirul Dkk. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah : (Studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Malang Tahun anggaran 2008-2012). *Jurnal administrasi publik (JAP)*. Vol 2. No.2, Tahun 2013
- Susilawati, Desi, dan Wardana, Kusumastuti, Linda dkk. Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan : Studi Kasus BKAD Sleman. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* Vol.1 No.2, Tahun 2018.
- Wahyudi, Muhammad dan Wulandari, Eva. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang). *Jurnal RAK* Vol.2 No.3, Tahun 2017.

Sumber Dari Skripsi

- Adhiantoko, Hony. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

- Dora, Juliani. 2017. *Analisi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Hakim, Faishal. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Istyaningsih, Dian. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Skripsi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.
- KS. Lazyra. 2016. *Analisi Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Skripsi.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Purba, Ris Ulina. 2012. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Ratri, Patriati. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah. Skripsi.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rizky, Puput. 2015. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen. Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Ketentuan yang Berlaku

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.36 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.